

## **Pengembangan Skala Usaha Bumdes Tritunggal Mandiri melalui Pemanfaatan Potensi Desa Martadah Baru Kabupaten Tanah Laut**

**Semuel Risal<sup>1\*</sup>, Irawanto<sup>2</sup>, Misransyah<sup>3</sup>, Riki Welly Saputra<sup>4</sup>, Cici Asmawati<sup>5</sup>, Singgih Priyono<sup>6</sup>,  
STIA Bina Banua Banjarmasin**

**ABSTRAK:** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi sumberdaya yang ada di desa. Minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes. Tujuan pengabdian ini adalah melakukan pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes yang diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam sehingga BUMDes dikembangkan sesuai dengan potensi lokal, memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para *stakeholder* desa tentang BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dan merumuskan bentuk-bentuk usaha yang dapat dilakukan melalui BUMDes serta menginventarisasi rancangan usaha (business plan) prioritas rintisan BUMDes yang berpeluang untuk ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes di desa Martadah Baru. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan survey, diskusi (FGD) dalam forum pertemuan desa dan perumusan rencana (kerja) usaha. Selain dapat menemukan potensi usaha, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholder* tentang pentingnya peran BUMDes, hasil kegiatan ini dapat mengidentifikasi bentuk usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi unggulan desa dan merumuskan prioritas rencana bisnis BUMDes, dan merekomendasikan implementasi ditindaklanjuti untuk usaha ekonomi produktif yang dapat membantu pengembangan ekonomi masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Scal Up BUMDes, Potensi Desa, Ekonomi Desa

## **Business Scale Development of Independent Tritunggal Bumdes through Utilization of the Potential of Martadah Baru Village, Tanah Laut Regency**

**Semuel Risal<sup>1\*</sup>, Irawanto<sup>2</sup>, Misransyah<sup>3</sup>, Riki Welly Saputra<sup>4</sup>, Cici Asmawatiy<sup>5</sup>, Singgih Priyono<sup>6</sup>,  
STIA Bina Banua Banjarmasin**

**ABSTRACT:** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are village business institutions that aim to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of existing resources in the village. The minimal contribution of BUMDes to economic growth is due to the limited quality of human resources, governance of BUMDes, to the lack of understanding of the potential of the village as the basis for BUMDes business. The purpose of this service is to develop the capacity of BUMDes management which begins with conducting in-depth research and mapping so that BUMDes are developed according to local potential and provides knowledge and understanding for village stakeholders about BUMDes that are following the needs and potential of the village and identify potential owned by the village and formulate forms of business that can be carried out through BUMDes and take an inventory of priority business plans (business plans) for BUMDes pilots that have the opportunity to be followed up as BUMDes businesses in Martadah Baru village. The method of implementing this activity is by conducting surveys, and discussions (FGD) in village meeting forums and formulating business (work) plans. In addition to being able to find business potential, and increase knowledge and understanding of stakeholders about the importance of the role of BUMDes, the results of this activity can identify BUMDes business forms that are following the village's superior potential and formulate priorities for BUMDes business plans, and recommend implementation actions for productive economic businesses that can assist development. the rural economy.

**Keywords:** BUMDes Scale Up, Village Potential, Village Economy.

*submitted: 04-08-2022; Revised: 13-08-2022; Accepted:23-08-2022*

**\*Corresponding Author :** srizal01@gmail.com

## PENDAHULUAN

Setelah ada ketegasan pengakuan Badan Hukum Bumdes lewat Pasal 117 di UU Cipta Kerja, maka tantangan terbesar Bumdes adalah pada Pengembangan Usaha dan Penguatan Manajemen. Produk-produk yang dihasilkan Desa dan Bumdes, secara umum kualitas masih rendah, skala kecil dan harga kurang dapat bersaing. Perlu ada upaya untuk peningkatan nilai tambah produk sekaligus membangun jalur-jalur distribusi baru. Untuk itu Bumdes dan Bumdes Bersama perlu dipetakan, diklasifikasi, dan dilatih.

Lembaga ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah lokal, masyarakat dan pihak swasta bekerjasama mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan dan mendorong kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Pengembangan ekonomi local merupakan proses di mana pemerintah local dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi lokal atau berbasis desa yaitu melalui kelembagaan ekonomi lokal. Kelembagaan ekonomi local pada dasarnya berperan dalam mengatur sumberdaya dan berperan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Tim Visi Yustisia, 2015). Sehingga disini peran BUMDes sangat penting untuk meningkatkan ekonomi desa.

Program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes perlu diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam sehingga BUMDes dikembangkan sesuai dengan potensi lokal. Minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes. Dengan adanya pemetaan tersebut, selanjutnya perlu melakukan pelatihan dalam berbagai format mulai dari seminar untuk memberikan pemahaman regulasi dan kelembagaan BUMDes hingga diskusi kelompok dan praktik dengan materi analisis kelayakan usaha, perencanaan bisnis dan manajemen, hingga sharing kisah sukses.

Pilihan untuk memajukan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Bersama, merupakan pilihan yang tepat. Pada situasi ditengah Pandemi COVID 19, hampir semua sektor di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian. Sektor pertanian di Kwartal 3, masih bisa tumbuh 2.4%. Sesuai Arah Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Percepatan Pemulihan Ekonomi Desa, 24 September 2020, bahwa pandemic ini harus jadi momentum untuk menginstal ulang, melakukan reformasi dan transformasi ekonomi desa. Secara umum ada tiga arahan Presiden pertama untuk sinkronisasi program, peningkatan partisipasi dan kreasi masyarakat dalam memajukan sektor-sektor

unggulan desa dan peningkatan daya ungkit dengan masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga bisa up skilling dan naik kelas.

Kemendes PDTT juga telah mengeluarkan Permendes No13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa berbasis SDGs Desa. Tiga prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk tahun 2021 adalah :(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, utamanya untuk pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Bumdes, listrik desadan usaha ekonomi produktif (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Dana Desa untuk pencapaian SDGs Desa yaitu pengembangan teknologi informasi, desa wisata, pencegahan stunting, ketahanan pangan dan desa inklusif.

Hal ini untuk menjawab berbagai kritik tentang pemanfaatan dana desa yang masih banyak belum tepat sasaran dan disinyalir hanya menguntungkan elit-elit didesa saja. Menurut data BPS 2018, saat ini masih tercatat 13.232 desa tertinggal (17,96%), 54.879 (74.49%) desa berkembang dan 5.559 desa mandiri (7.55%). Hal itu perlu di dukung karena saat ini ada 47.288 Desa yang memiliki Bumdes, 39,141 sudah terdaftar di Aplikasi Registrasi Online Kemendes, dan sudah selesai dilakukan validasi untuk 18.195 Bumdes, dengan kategori 4.651 Bumdes Maju, 9.682 Berkembang dan 3.861 Pemula. Artinya, meskipun ada peluang yang nyata untuk pemulihan ekonomi local lewat penguatan sector pertanian dan kelembagaan Bumdes, namun masih banyak hal perlu diselesaikan. Setelah ada ketegasan pengakuan Badan Hukum Bumdes lewat Pasal 117 di UU Cipta Kerja, maka tantangan terbesar Bumdes dan Bumdes Bersama selanjutnya adalah pada Pengembangan Usaha dan Penguatan Manajemen. Produk-produk yang dihasilkan Desa dan Bumdes, secara umum kualitas masih rendah, skala kecil dan harga kurang dapat bersaing. Perlu ada upaya untuk peningkatan nilai tambah produk sekaligus membangun jalur-jalur distribusi baru. Untuk itu Bumdes dan Bumdes Bersama perlu dipetakan, diklasifikasi, dilatih.

Sementara itu Kepala Desa Martadah Baru menyampaikan potensi desanya yang perlu sentuhan dari lintas stakeholder diantaranya pengelolaan Bumdes, Peningkatan Bumdes dan desa wisata, hingga potensi perkebunan dan pertanian, tetapi penjualan hasil pertanian dikendalikan tengkulak. Selain itu, salah satu masalah yang dihadapi adalah peningkatan pemasaran produk lokal berupa batik Saringkel yang sudah di wacanakan bupati Tanah Laut akan di jadikan sebagai desa wisata Sasirangan. Desa Martadah Baru merupakan 1 diantara 6 desa pengrajin Batik di Tanah Laut, tetapi Produk batik Dari Desa Martadah Baru, karena motifnya sangat beragam diantaranya ada yang bermotif kijing yang merupakan maskot Tanah Laut, ada juga Saringkel, jagung, anggrek, yang sekarang menjadi pakaian kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun warga Martadah Baru masih belum punya branding yang bisa dipasarkan serta masih dilaksanakan secara individu belum terorganisir secara baik. Terkait dengan hal tersebut Tim dari STIA Bina Banua Banjarmasin menyampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjawab problem tersebut diantaranya melakukan branding yang mampu bersaing

dipasarkan, kedua Bumdes maupun UMKM perlu melakukan pengkaderan warisan budaya batik tersebut, sehingga terus berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi keberadaan BUMDes Tritunggal Mandiri belum memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Begitupun dengan masih kecilnya persentase anggaran yang dialokasikan untuk kas desa (Pades) menyebabkan warga berpendapat bahwa BUMDes belum bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Padahal BUMDes yang berdiri sejak tahun 2015, dengan akumulasi penyertaan modal yang cukup besar dari tahun ke tahun seharusnya sudah menjadi BUMDes yang mandiri dan maju untuk memberikan manfaat ekonomi dan social bagi masyarakat desa Martadah baru secara khusus dan Tanah Laut secara umum. Namun berbagai persolan yang dihadapi, diantaranya belum memanfaatkan potensi desa untuk pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan. Jenis usaha yang dijalankan di bulan pebruari 2022 yakni penjualan ATK untuk kebutuhan desa, manfaat dan kontribusi Bumdes masih sangat kecil.

Sementara permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat atau pelaku usaha di desa adalah keterbatasan modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Belum optimalnya kinerja pengurus karena pengurus hanya bekerja secara sukarela sehingga sulit untuk mewujudkan profesionalisme kerja. Dengan kondisi tersebut diperlukan adanya pengembangan usaha agar Bumdes Tri Tunggal Mandiri bisa memberikan manfaat yang besar bagi desa dan masyarakat Desa Martadah Baru. Karena potensi yang dimiliki Tanah Laut sangat besar, seperti sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan dan budaya khususnya batik local sebagai salah satu sector andalan di Desa Martadah Baru.

Namun permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pengrajin Batik di Martadah Baru adalah kurangnya akses dan informasi tentang pemasaran sehingga mereka hanya menunggu orderan. Padahal kualitas batik Saringkel sangat diminati oleh masyarakat luas di Kalimantan Selatan, sehingga tidak mengetahui adanya Batik Saringkel dan masalah keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan Batik Saringkel belum berkembang dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tim pengabdian akan melaksanakan kegiatan pengabdian yang berjudul "Pengembangan Skala Usaha Bumdes Tritunggal Mandiri Melalui Pemanfaatan Potensi Desa Martadah Baru Kabupaten Tanah Laut".

Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini adalah,  
Aspek Manajemen :

1. Masih lama dan tidak ada sistem pembukuan yang professional.
2. Dalam pemberian pinjaman, banyak konsumen yang membayar pinjaman cicilan dalam waktu lama sampai 3 bulan sehingga Bumdes kesulitan dalam permodalan.
3. Proses Bisnis dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) belum terdokumentasi dan dilaksanakan secara baik.

4. Mitra belum mempunyai sistem yang terintegrasi antara bagian pemesanan oleh konsumen,

Aspek produksi :

1. Dalam pengelolaan Bumdes Jabar masih kekurangan SDM sehingga produksi batik belum dikelola Bumdes dan masih menjadi usaha individu.
2. Masih sedikit yang memproduksi batik lokal dan berdasarkan pesanan konsumen.

Aspek Pemasaran :

1. Belum maksimal memanfaatkan pemasaran secara online.
2. Pasar offline masih menjadi pilihan utama para pengrajin batik dan tergantung pada pesanan konsumen.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman bagi stakeholder desa tentang peningkatan scaleup BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, mengidentifikasi potensi yang dimiliki desa dan merumuskan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui BUMDes serta menginventarisasi rancangan usaha (business plan) prioritas pengelolaan rintisan BUMDes yang berpeluang untuk ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes pada desa Martadah Baru. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini memberikan manfaat peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan desa dan masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes. Dengan demikian rancangan usaha BUMDes berbasis kebutuhan dan pengembangan potensi desa yang terbentuk dapat bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh desa untuk diimplementasikan.

## **PELAKSAAN DAN METODE**

### **A. METODE PELAKSANAAN**

#### **1. Lokasi**

Lokasi pengabdian adalah Bumdes Tri Tunggal Mandiri yang berlokasi di Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Alasan pemilihan Desa Martadah Baru karena letaknya sangat strategis dan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi SDA yang besar khususnya sektor pertanian dan perkebunan, hingga kerajinan batik Saringkel, dimana Masyarakatnya yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan pengrajin batik. Dalam penjualan hasil pertanian, selama ini di jual kepada tengkulak dengan harga yang ditetapkan tengkulak dibawah harga pasar, sementara dalam pengolahan batik, masyarakat desa Martadah Baru masih berjalan sendiri sendiri dalam memasarkan hasil produksinya berdasarkan pesanan dari pelanggan dan peran Bumdes belum maksimal dalam memajukan kerajinan batik. Oleh karena itu Tim memilih melakukan PKM di Desa Martadah Baru, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan sebagai obyek Pengabdian khususnya peran dari Bumdes Tri Tunggal Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat Desa Martadah Baru.

## 2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan : 1). Wawancara secara mendalam (indept interview); 2). Focus group discussion (FGD); 3). Dokumentasi

## 3. Teknik Analisa Data

Didalam penelitian diskriptif, proses analisis dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data dilapangan berlangsung, sehingga dalam penelitian kualitatif sering dikenal sebagai proses siklus. Setelah mendapatkan informasi, dilakukan analisis untuk menemukan kesimpulan awal kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mempergunakan pendekatan "cross check" informan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam berbagai pernyataan yang dikemukakan oleh informan, serta berdasarkan hasil observasi dan telaah data sekunder.

## **B.Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung target luaran kegiatan pengabdian ini, dimulai dengan menemukan masalah, pelaksanaan kegiatan dan solusi pemecahan masalah yang dilakukan melalui beujuan kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan dalam rangka membantu desa Martadah Baru untuk merumuskan rencana usaha pembentukan rintisan BUMDes yang sesuai dengan potensi berapa tahapan, antara lain:

1. Pertemuan awal. Pada tahap ini, kegiatan diawali dengan melakukan pertemuan dengan Camat, kemudian dari hasil diskusi, camat merekomendasikan salah satu desa potensial yang dapat dikembangkan adalah desa Martadah Baru. Selanjutnya mendatangi Kepala Desa, perangkat desa dan pengurus BUMDes Martadah Baru untuk memperoleh persepsi yang sama tentang potensi dan keunggulan yang dimiliki desa.

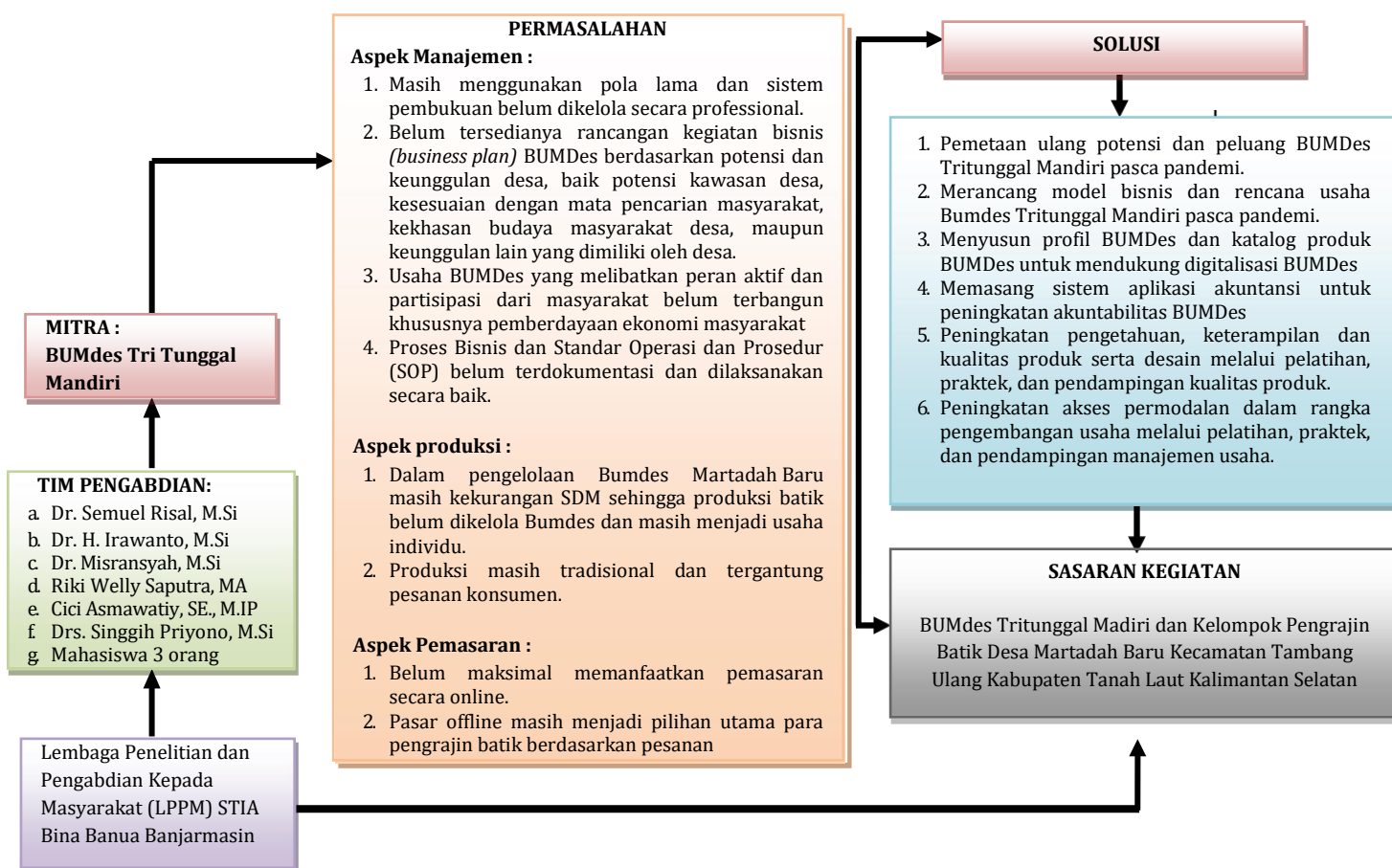


Gambar 1. Pertemuan awal dengan Camat Tambak Ulang dan Kepala Desa Martadah Baru, berdialog tentang potensi desa

2. Menggali kebutuhan dan potensi BUMDes. Pada tahap ini, Tim pengabdian menggali kebutuhan masyarakat terhadap potensi BUMDes Martadah Baru yang dilakukan dengan cara melakukan survey melalui penyebaran kuisisioner serta wawancara kepada pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok pemuda/karang taruna, pengurus BUMDes, ketua RT dan perwakilan masyarakat.
3. Inventarisasi hasil survey. Pada kegiatan ini, hasil survey diinventarisasi dan pemetaan bentuk-bentuk kegiatan usaha BUMDes sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki desa dan mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.
4. Forum pertemuan musyawarah desa. Hasil dari rancangan usaha BUMDes selanjutnya disampaikan dan didiskusikan dalam suatu forum pertemuan musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan desa dan masyarakat.
5. Inventarisasi rancangan usaha BUMDes. Tahap akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini adalah menginventarisasi prioritas rancangan pengelolaan dan usaha rintisan BUMDes dan memberikan rekomendasi pelaksanaannya sehingga dapat ditindaklanjuti dalam tata kelola BUMDes.
6. Evaluasi dan Pelaporan. Evaluasi dilakukan melalui monitoring ke Bumdes setelah kegiatan lapangan dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara, FGD dan kuisisioner. Setelah semua tahapan diselesaikan, data-

data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis, diverifikasi kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dibuat laporan akhir.

Untuk menjaga kesinambungan/ keberlanjutan hasil kegiatan maka pasca pelaksanaan kegiatan lapangan, selanjutnya program Scale Up Bumdes akan dikonsolidasikan dan disinergikan dengan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk pelatihan, pendampingan lebih lanjut, promosi, dan partisipasi pada pameran produk UMKM, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang sebagai Desa Mandiri Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 2. Conceptual Framework

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala beberapa masalah. Salah satunya, masyarakat desa masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya BUMDes. Ada Kepala desa yang tahu, ada inisiatif mendirikan BUMDes, tapi tidak merasa ada untungnya. Bahkan, ada

yang tahu, tapi asalkan mendirikan BUMDes. Sehingga perlu membangun pemahaman mengenai pentingnya BUMDes dan kenapa mendirikan BUMDes.

Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengetahuan masyarakat at tentang BUMDes serta tujuan pendiriannya maka dilakukan studi pendahuluan dengan melakukan survey melalui pengisian kuisisioner dan wawancara awal kepada para *stakeholder* desa seperti kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok pemuda, ketua RT, perajin batik dan masyarakat. Kuisisioner menggali informasi tentang pengetahuan dan manfaat BUMDes serta pihak yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes.

Hasil dari tahapan ini menunjukkan bahwa sebagian besar *stakeholder* desa dan masyarakat sudah memahami tentang BUMDes dan mengetahui manfaat keberadaan BUMDes bagi masyarakat. Mereka menyatakan bahwa dengan BUMDes akan bias memberikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perputaran ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa. Sebagian besar pemangku kepentingan desa menginginkan pembentukan dan pengembangan usaha BUMDes. Hasil dari tahapan ini juga mengungkapkan bahwa pembentukan dan pengelolaan BUMDes terutama harus didukung dan melibatkan masyarakat, kelompok pemuda /karang taruna, peran dari kepala desa dan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan menyerap aspirasi pimpinan desa dan perwakilan kelompok masyarakat dapat dinyatakan bahwa pembentukan usaha BUMDes di Desa sudah melalui prosedur yang ditetapkan, tetapi BUMDes belum memberikan manfaat bagi masyarakat desa Martadah Baru.

#### Inventarisasi Potensi Desa dan Kebutuhan Masyarakat

Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh kemampuan dalam mengidentifikasi bentuk usaha BUMDes yang tepat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dan kebutuhan masyarakat. Faktor lain yang mendorong keberhasilan pelaksanaannya adalah adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai pengelola BUMDes dalam menjalankan kegiatan operasional BUMDes yang didukung oleh kemampuan manajemen usaha dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan penyebaran kuisisioner dan diskusi untuk mengidentifikasi potensi desa dan bentuk usaha BUMDes yang didukung keberadaannya oleh pemangku kepentingan desa dan masyarakat. Hasil dari kegiatan selanjutnya untuk dibahas sebagai salah satu agenda pada pertemuan musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan desa sehingga diharapkan dapat menjadi program kerja desa yang didukung oleh semua masyarakat.



Gambar 3. Diskusi pemetaan potensi desa untuk peningkatan skala usaha BUMDes dengan Perangkat Desa, Pengurus BUMDes dan masyarakat

Berdasarkan studi awal dan FGD dengan pemangku kepentingan desa dapat dirumuskan beberapa faktor kunci yang penting untuk dipertimbangkan dalam kegiatan BUMDes Tritunggal Mandiri, sebagai berikut:

1. Dalam menyusun kegiatan ekonomi produktif, desa harus melibatkan *stakeholder* desa dan menyerap aspirasi kelompok masyarakat desa secara luas sehingga keberadaannya dapat didukung oleh masyarakat desa.
2. Desa perlu membuat usaha yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti BUMDes yang melibatkan peran aktif dan partisipasi dari seluruh masyarakat.
3. Bentuk rancangan kegiatan bisnis (*business plan*) BUMDes sebaiknya dibuat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi kawasan desa, kesesuaian dengan mata pencarian masyarakat, kekhasan budaya masyarakat desa setempat, keragaman kuliner makanan dan minuman khas maupun keunggulan lain yang dimiliki oleh desa.
4. BUMDes yang dibuat bukan merupakan usaha jangka pendek yang bersifat musiman, tetapi harus merupakan peluang usaha yang dapat berlangsung dalam jangka panjang yang bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara luas.
5. BUMDes Tritunggal Mandiri telah terbentuk tetapi mengalami kendala dalam kegiatan operasional perlu dilakukan pembinaan melalui pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan maupun pemasaran produk.
6. Perlu dilakukan tindakan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan BUMDes serta mengetahui permasalahan dan kendala operasional yang ada sehingga ke depan dapat semakin mengoptimalkan kinerja BUMDes untuk menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Martadah Baru.



Gambar 4. Diskusi prioritas usaha BUMDes dengan Perangkat Desa, Pengurus BUMDes dan masyarakat

#### Perumusan Usaha Prioritas berbasis potensi Desa

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat kemitraan ini dapat mengidentifikasi rencana bisnis yang dapat ditindaklanjuti sebagai usaha BUMDes pada Desa Martadah Baru. Rencana bisnis BUMDes yang dibuat telah mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh desa dan kebutuhan masyarakat. Dalam tahapan ini berhasil diinventarisasi daftar rencana kegiatan BUMDes yang berpotensi dapat dilakukan dan selanjutnya ditentukan rencana prioritas untuk kegiatan yang ditindaklanjuti. Selain itu, juga dapat diidentifikasi faktor-faktor penting dalam mendukung keberhasilan BUMDes serta kendala dan hambatan yang harus dapat diantisipasi baik untuk pembentukan BUMDes maupun dalam aspek pengelolaan.

Inventarisasi usaha BUMDes yang diidentifikasi dan dapat dikembangkan sebagai rencana bisnis pada Desa Matadah Baru antara lain adalah desa wisata, wisata alam, peternakan, pertanian, home industri/industri rumah tangga, layanan jasa dan kerajinan. Namun demikian dari daftar rencana bisnis tersebut perlu penentuan prioritas usaha yang akan ditindaklanjuti karena mayoritas pemangku kepentingan desa dan masyarakat menginginkan beberapa usaha prioritas untuk dijalankan. Berdasarkan skala prioritas usaha BUMDes yang dapat ditindaklanjuti adalah: (1) usaha batik saringkel; (2) usaha pemasaran dan distribusi pupuk; (3) usaha lembaga keuangan desa (LKD) sebagai penunjang dan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perkebunan/pertanian dan perdagangan; serta (4) usaha perdagangan untuk menampung produk pertanian dan perkebunan. Bahkan gagasan untuk mengembangkan usaha pendukung BUMDes lainnya seperti : (1) pemasaran produk hasil industri rumahan berupa batik saringkel; (2) usaha penyewaan peralatan, aset desa; (3) usaha kerajinan khas desa; (4) internet desa; serta usaha sosial (layanan air minum desa, listrik desa) maupun gagasan tentang pembentukan desa ekowisata/desa wisata.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat direkomendasikan faktor pendukung keberhasilan BUMDes yang harus dipersiapkan dengan baik

seperti : (1) kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM); (2) komitmen pimpinan desa dan pengelola BUMDES; (3) kemampuan mengelola usaha (termasuk pemasaran dan pengembangan usaha ke depan); (4) kemampuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta (5) kontinuitas/ keberlanjutan usaha. Namun demikian hambatan dan kendala dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes juga perlu diantisipasi seperti : (1) kurang terciptanya komunikasi yang transparan antara pimpinan desa dan masyarakat tentang BUMDes; (2) kurangnya akses promosi dan pemasaran; (3) keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang profesional; (4) kemampuan manajemen usaha BUMDes yang kurang memadai; (5) komitmen pengelola yang kuat untuk keberlanjutan BUMDes; serta (6) kurangnya kemampuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes serta terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha.

Sehingga untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan BUMDes, perlu dipersiapkan faktor pendukung dalam pembentukan rencana usaha BUMDes dan mengoptimalkan usaha BUMDes yang telah berjalan dengan melakukan pelatihan manajemen usaha BUMDes, pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, pelatihan penggunaan Teknologi dan Informasi bagi pengelola BUMDes untuk mengantisipasi transformasi digital. Selain itu perlu komitmen dan dukungan dari kepada desa dan aparat serta masyarakat untuk optimalisasi peran BUMDes, pelatihan manajemen usaha dan transparansi pengelolaan keuangan BUMDES dan kebutuhan alokasi dana-dana pengembangan BUMDes. Dengan demikian pengelolaan usaha BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan survey terhadap potensi unggulan desa, diskusi dalam forum pertemuan desa dan perumusan rencana usaha BUMDes dalam FGD pemetaan potensi desa. Hasil kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pembentukan BUMDes sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Selain itu, hasil kegiatan ini juga dapat mengidentifikasi dan merumuskan bentuk usaha BUMDes sesuai dengan potensi unggulan desa dan kebutuhan masyarakat serta dapat merumuskan prioritas rencana bisnis BUMDes. Dengan demikian melalui rancangan usaha bisnis BUMDes yang mengakomodir potensi desa dengan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan desa dan kelompok masyarakat diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas.

### **Rekomendasi**

Agar rancangan usaha BUMDes secara operasional dapat dijalankan dengan baik maka diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan desa dan pemangku kepentingan desa. Demi memperkuat ekonomi desa, BUMDes harus terus survive dan kepala desa serta pengurus BUMDes harus terus menjalankan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan berkaitan dengan pembenahan administrasi, manajemen usaha serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan. Selain itu perlu membangun kolaborasi dengan mitra, agar BUMDes dapat bermanfaat untuk masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin, yang telah memberikan dukungan dana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIA Bina Banua Banjarmasin tahun Anggaran 2021.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Khoirul dkk. 2012. Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam. Pustakaraya KTSP. Jakarta
- Ginting, Perdana. (2007). Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri, Cetakan Pertama. Bandung: Yrama Widya
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kusumadewi, L. R. (2010). Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol.15, No, 64.
- Mardikanto. 2012. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Cetakan 1. UNS Press. Surakarta.
- Miles, Mathew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London, Sage Publication Ltd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah., Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nurmeisarah, T., Sudirtha, I.G. & Angendari M.D. (2015). Tinjauan Tentang Tenun Tradisional Dusun Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet